

DAMPAK PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MAMASA

BUNYAMIN *)

Abstract : This study aims to determine the impact of Gross Regional Domestic Product (GDP) of the Revenue Mamasa, and to find out how big the impact of Economic Growth of Revenue. To analyze the economic growth and revenue using time series analysis. Based on the research results it can be concluded as follows: Revenue Indicator Gross Regional Domestic Product (GDP), very influential on the Revenue. The amount of revenue impact on economic growth with GDP indicator of 93.71%. The calculation of GDP is used in the District of GDP based Mamasa current price.

Keyword : Economic Growth, Gross Domestic Product (GDP) atau Gross National Product (GNP), time series.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan pemerintah daerah, baik ditingkat propinsi maupun tingkat Kabupaten dan Kota memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya UU No 22 tahun 1999 dan Undang-Undang no. 25 tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dalam perkembangannya kebijakan ini diperbaharui dengan dikeluarkannya UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004. Kedua Undang-Undang ini mengatur tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kebijakan ini merupakan tantangan dan peluang bagi pemerintah daerah (pemda) dikarenakan pemda memiliki kewenangan lebih besar untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif.

Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah. Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pelaksanaan desentralisasi fiskal dilakukan pada saat kurang tepat mengingat hampir seluruh daerah sedang berupaya untuk melepaskan diri dari krisis ekonomi yang dimulai pertengahan 1997. Akibatnya kebijakan ini memunculkan kesiapan (fiskal) daerah yang berbeda satu dengan yang lain. Kebijakan ini justru dilakukan pada saat terjadi disparitas pertumbuhan (ekonomi) yang tinggi.

Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah. Daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya rendah, cenderung mengalami tekanan fiskal yang kuat. Rendahnya kapasitas ini mengindikasikan tingkat kemandirian daerah yang rendah. Daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya dengan memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor produktif.

Hakekat pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional adalah terwujudnya kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial sebagaimana telah diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Artinya bahwa dengan adanya proses pembangunan yang dilaksanakan secara berkelanjutan dari waktu ke waktu

diharapkan adanya perubahan yang signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Sedangkan tewujutnya kesejahteraan rakyat dapat diukur dari tingkat pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, politik dan keamanan. Berbagai ukuran tersebut berpangkal tolak pada tingkat perekonomian. Oleh karena itu untuk program pembangunan daerah lebih ditekankan pada pembangunan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran dari hasil kerja pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi selalu menjadi sala satu indicator peningkatan kesejahteraan penduduk dalam suatu daerah atau Negara.pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional pada hakekanya adalah upaya meningkatkan kapasitas pertumbuhan daerah sehingga mampu menjalankan pemerintahan daerah yang baik. Pembangunan daerah dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu:

1. Pendekatan sentralisasi
2. Pendekatan desentralisasi

Otonomi daerah merupakan pembangunan dengan pendekatan desentralisasi yang erat kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sala satu tujuan utama desentralisasi adalah menciptakan kemandirian daerah, dalam hal ini pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber lokal khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah.

Dalam undang-undang No 25 Tahun 1999 dijelaskan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah.

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain penerimaan yang sah

Yang dimaksud dengan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah adalah

1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

4. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah

Selanjutnya sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Mamasa terhadap kesejahteraan masyarakat Mamasa khususnya sebagai kontribusi kesejahteraan nasional umumnya dilakukan dengan pelaksanaan pembangunan wilayah yang terencana, terarah dan berkesinambungan.

Berangkat dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Dampak Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamasa.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang melatarbelakangi penelitian ini, maka penulis merumuskan berbagai permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mamasa?
2. Seberapa besar pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mamasa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Dampak Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah Mamasa.
2. Untuk mengetahui seberapa besar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sen yang dikuip dari dari buku Ismail Nawawi (2009:85), istilah pembangunan ekonomi (*economic development*) digunakan sebagai nama lain atau sinonim dari istilah “ pertumbuhan

ekonomi (*economic growth*) atau bahkan kemajuan teknologi (*economic progress*) secara umum. Tolak ukurnya adalah Produk Domestik Bruto dan pendapatan perkapita.

Hera susanti (2007: 21) Pertumbuhan ekonomi adalah sala satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis pembangunan ekonmi yag terjadi pada suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktifitas perekomian masyarakat adalah suatu proses penggunaan factor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya hanya akan menghasikan suatu aliaran balas jasa terhadap faktor produksi yang dihasilkan oleh masyrakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan turut meningkat.

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Pengertian ini terdapat tiga aspek yang ditekankan yaitu pertama, pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses dan bukan sebagai gambaran ekonomi pada suatu saat. Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa ada aspek dinamis dari suatu perekonomian, yang artinya yaitu suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu.

Sedangkan aspek yang ke dua yaitu pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output perkapita, disini jelas ada dua sisi yang perlu diperhatikan yaitu sisi output totalnya (GDP) dan sisi jumlah penduduknya. Kemudian aspek ketiga adalah perspektif waktu jangka panjang. Suatu perekonomian tumbuh apabila dalam jangka waktu yang cukup lama mengalami output perkapita. Oleh karena itu proses pertumbuhan ekonomi harus bersifat *self-generation* yang berarti bahwa proses pertumbuhan itu menelurkan kekuatan bagi timbulnya kelanjutan per-

tumbuhan tersebut dalam periode-periode selanjutnya.

Secara umum pertumbuhan ekonomi dapat diartikan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai kenaikan *Gross Domestic Product* (GDP) atau *Gross National Product* (GNP) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kemampuan suatu negara dalam menyediakan kebutuhan akan barang dan jasa kepada masyarakat dalam jumlah yang banyak sehingga memungkinkan untuk kenaikan standar hidup yang mana berdampak pula bagi penurunan tingkat pengangguran dalam jangka panjang. Todaro (1997) secara spesifik menyebutkan ada tiga faktor atau komponen utama pertumbuhan ekonomi, yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja yang dianggap secara positif merangsang pertumbuhan ekonomi.

Berbicara mengenai pendapatan regional perkapita adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga biaya faktor dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun. Pada umumnya indikator ini disajikan dari angka atas dasar harga berlaku walaupun sebetulnya masih mengandung perubahan harga barang dan jasa, nilai tambah yang diciptakan masing - masing penduduk akibat dari adanya aktivitas ekonomi.

B. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diukur dengan indikator utama yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Adiatmojo (2003:57)

menjelaskan pengertian PDRB adalah suatu indikator untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah secara sektoral, sehingga dapat dilihat penyebab pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tersebut.

Secara umum kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari berbagai perspektif seperti tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, kondisi perumahan, sosial, budaya serta jaminan persamaan hak dalam politik, hukum dan keamanan/ketertiban. Indikator-indikator output tersebut baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama (komposit) dapat diberikan gambaran mengenai kesejahteraan masyarakat yang ditinjau dari aspek sosial.

Begitu banyak indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat, namun ada satu indikator kumulatif yang lazim digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan ekonomi, yaitu Produk Domestik Bruto/*Gross Domestic Product* (PDB/GDP). Produk Domestik Bruto adalah istilah yang digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan nasional, sedangkan pada level yang lebih rendah biasa digunakan istilah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Produk Domestik Regional Bruto adalah nilai tambah yang mampu diciptakan sebagai aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. Istilah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gabungan dari empat kata yaitu:

1. Produk, artinya seluruh nilai produksi baik barang maupun jasa.
2. Domestik, artinya perhitungan nilai produksi yang dihasilkan hanya oleh faktor-faktor produksi yang berada dalam wilayah domestik tanpa melihat apakah faktor produksi tersebut dikuasai oleh penduduk atau bukan.
3. Regional, artinya perhitungan nilai produksi yang dihasilkan hanya oleh penduduk tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang di-

gunakan berada dalam wilayah domestik atau bukan.

4. Bruto, artinya perhitungan nilai produksi kotor karena masih mengandung biaya penyusutan.

Berdasarkan empat pengertian istilah diatas maka arti PDRB adalah seluruh nilai produksi kotor baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi yang beroperasi dalam suatu wilayah, biasanya dihitung dalam suatu periode tertentu.

Untuk lebih memahami beberapa istilah dalam statistik Pendapatan Regional, dibawah ini dapat dilihat beberapa definisi sebagai berikut:

- a. *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)*, adalah seluruh nilai netto barang dan jasa (komoditi) yang diproduksi pada suatu wilayah domestik/wilayah tanpa memperhatikan faktor-faktor produksinya.
- b. *PDRB atas dasar harga berlaku*, adalah jumlah nilai barang dan jasa (*komoditi*) atau pendapatan, atau pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga berlaku pada tahun yang bersangkutan.

C. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Membahas mengenai pendapatan asli daerah, bahwa sebagian besar upaya yang dilakukan daerah untuk bisa mengurangi dana yang diperoleh dari pemerintah pusat adalah dengan memacu upaya memperoleh pendapatan asli daerah sebesar mungkin. Metode yang paling populer sampai dengan saat ini adalah dengan mengeksploitasi sumber daya alam daerah yang ada, dan melalui pajak dan retribusi daerah. Cara pertama sangat mungkin dilakukan, apabila di daerah sumber daya alamnya memang melimpah, namun bagi daerah yang miskin akan sumber daya alam umumnya mengambil jalan lain yaitu meningkatkan penerimaan dengan cara kedua.

Sedangkan dalam undang-undang No. 29 Tahun 2002, prioritas anggaran belanja pembangunan jasa akan diprio-

ritaskan untuk meningkatkan pembangunan daerah melalui otonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat, mempersiapkan pemilu yang demokratis, memantapkan persatuan kesatuan dan ketertiban umum, membangun dan memelihara sarana dan prasarana penunjang pembangunan ekonomi, serta meningkatkan penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 (2004:213) pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Gede Edy Prasetya (2005:52), Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan PERDA, yang digunakan untuk belanja operasional yang dilaksanakan pemerintah daerah. Pemungutan ini sebenarnya bertujuan menjaga keamanan kondisi keuangan daerah untuk membiayai belanja operasi pemerintah daerah.

Selanjutnya Mardiasmo (2004:98) mengemukakan Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor

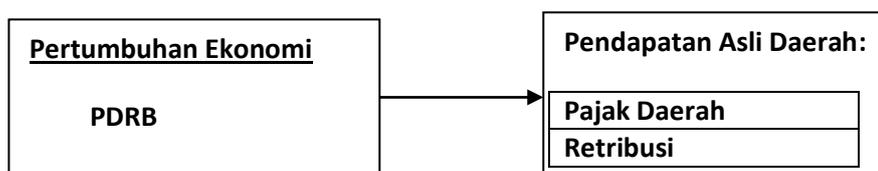
pajak, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Jadi pengertian PAD dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangannya untuk membiayai tugas-tugas dan tanggungjawabnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat kita ketahui bahwa indikator dari pertumbuhan ekonomi daerah antara lain adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kemudian indikator pendapatan asli daerah adalah sumber-sumber pendapatan asli daerah yaitu terdiri dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Untuk lebih jelasnya pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah terhadap pendapatan asli daerah dapat dijelaskan pada gambar berikut:



METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa. Waktu penelitian dilaksanakan selama 2 (dua) bulan yaitu bulan Juni sampai Juli 2011

B. Jenis dan Sumber Data. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan terdiri atas dua data yaitu:

- 1). Data kualitatif yang berupa data dalam bentuk angka-angka yang meliputi data dalam bentuk uraian dan penjelasan yang memerlukan pengelolaan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
- 2). Data kuantitatif adalah data dalam bentuk angka dan penjelasan yang meliputi bentuk dokumen.

Mudrajad kuncoro (2009:145) data kualitatif adalah data yang diukur

dalam skala numerik atau angka. Dan data kuantitatif adalah data yang tidak dapat diukur dengan skala numerik.

Sumber Data

Sumber data atau informasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari beberapa instansi atau kantor dinas yang berkaitan yang berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.
2. Data primer adalah data yang secara langsung diambil dari kantor dinas yang berkaitan berupa data yang diperoleh dari wawancara dan pengamatan (observasi) dilokasi objek penelitian.

Metode Analisis Data

Untuk menganalisis mengenai pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah akan dianalisis dengan menggunakan *time series*.

Dan untuk mengukur hubungan antara pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah digunakan koefisien determinasi:

$$r^2 = \frac{[n \sum xy - (\sum x)(\sum y)]^2}{(n \sum x^2 - (\sum x)^2)(n \sum y^2 - (\sum y)^2)}$$

Dan untuk melihat keeratan hubungan Peretumbuhan ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah digunakan kefisien korelasi:

$$r = \sqrt{r^2}$$

Definisi Operasional

Sehubungan dengan judul diatas maka penulis mengemukakan definisi operasional yang berkaitan dengan masalah yang akan diangkat untuk dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah kenaikan output perkapita dalam jangka panjang.
3. Cara perhitungan PDRB Kabupaten Mamasa menggunakan 2(dua) metode yaitu:

a. Metode Langsung

Dalam metode ini ada dua cara pendekatan yang dipakai dalam menghitung PDRB yaitu:

1. Metode Pendekatan Produksi, yaitu menghitung nilai tambah dari semua sector ekonomi dimana nilai tambah itu diperoleh setelah mengurangi nilai produksi dengan biaya antara. Dengan formula penghitungan sebagai berikut:

$$NTB = NPhp - BA$$

dimana:

NTB = Nilai Tambah Bruto

NPhp = Nilai Produksi pada harga produsen

BA = Biaya Antara

Apabila NPhp sulit untuk diketahui karena sulit memperoleh data harga produsen, maka NPhp dihitung sebagai berikut:

$$NPhp = NPhk - TTM$$

dimana:

NPhk = Nilai Produksi pada harga konsumen/eceran

TTM = Biaya Pemasaran dan Angkutan (trade and transport margin).

2. Metode Pendekatan Pendapatan, yaitu menghitung jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi, dengan formula penghitungan sebagai berikut:

$$NTB = NTN + PST$$

dimana:

NTB = Nilai Tambah Bruto
 NTN = Nilai Tambah Neto
 PST = Penyusutan (depresiasi barang modal) Nilai tambah neto dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$NTN = UG + SU + PTL$$

dimana:

UG = Upah dan Gaji (biaya tenaga kerja)

SU = Surplus Usaha, yang terdiri atas sewa tanah, bunga neto, dan profit

PTL = Pajak Tak Langsung Neto (setelah subsidi pemerintah dikeluarkan)

b. Metode Tidak Langsung

Di dalam cara ini penghitungan dilakukan dengan mengalokasikan PDRB atau nilai tambah dari setiap sektor/subsektor komoditas/kegiatan usaha dari lingkup nasional/ multi-regional ke dalam rangka regional dengan menggunakan indikator yang relevan.

4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang digunakan di Kabupaten Mamasa adalah PDRB atas dasar harga berlaku.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan PDRB Kabupaten Mamasa

Pembangunan perekonomian di Kabupaten Mamasa selama periode lima tahun terakhir (2005-2009), telah mengalami kemajuan pesat. Hal tersebut diperlihatkan dari hasil penghitungan dan penyusunan PDRB dari tahun ke tahun.

Berdasarkan hasil penghitungan PDRB Kabupaten Mamasa, pada tahun 2009 nilai PDRB atas dasar harga berlaku telah mencapai 901,41 milyar rupiah sedangkan tahun 2005 sebesar 525,16 milyar rupiah. PDRB Kabupaten Mamasa untuk tahun 2006, 2007, 2008 berturut-turut adalah 585,35 milyar rupiah, 675,82 milyar rupiah, dan 815,79 milyar rupiah.

Tabel 1
PDRB dan Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamasa Tahun 2005-2009

Tahun	PDRB Harga Berlaku (Milyar Rp)	PDRB Harga Konstan (Milyar Rp)	Pertumbuhan (%)
2005	525.16	426.64	3,70
2006	585.35	449.91	5,45
2007	675.82	479.90	6,67
2008	815.79	517.66	7,87
2009	901.41	540.06	4,33
Rata- Rata	700.71	482.83	5,60

Sumber: BPS Kab. Mamasa

Dari table 1 di atas dapat disimpulkan bahwa perekonomian di Kabupaten Mamasa terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2008, dimana perekonomian Kabupaten Mamasa tumbuh mencapai 7,87 persen. Berbeda dengan tahun 2009 dimana pertumbuhan ekonomi daerah ini, hanya sekitar 4,33 persen. Hal ini

disebabkan pembangunan di hampir seluruh sektor selama ini di Kabupaten Mamasa mengalami perlambatan. Jika dilihat pada periode tahun 2005-2009, rata-rata pertumbuhan relatif stabil, yaitu pertumbuhan sebesar 5,60 persen. Selama rentang waktu tahun tersebut laju pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2005 yakni sebesar 3,70 persen. Pertumbuhan ini menurun dari tahun sebelumnya

(2004) yang tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 4,34 persen. Hal ini mungkin disebabkan karena sebagai daerah otonomi yang baru terbentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Polewali Mamasa pada tahun 2002 sehingga kondisi perekonomiannya belum stabil.

B. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Sumber Pertumbuhan

Memasuki tahun 2009 ini laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamasa lebih lambat 3,54 persen bila dibandingkan dengan keadaan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2008 perekonomian Kabupaten Mamasa tumbuh sekitar 7,87 persen, dengan demikian pada tahun 2009 perekonomian Kabupaten Mamasa mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 4,33 persen. Lambatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamasa tahun 2009 ini disebabkan oleh lambatnya partum-

bahan di hampir semua sektor, kecuali sektor Perdagangan, hotel, dan Restoran, serta sektor Angkutan dan Komunikasi. Dimana tahun 2009 tumbuh untuk sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran tumbuh sebesar 3,52 persen atau naik sebesar 1,95 persen bila dibandingkan dengan tahun 2008. Sedangkan untuk sektor Angkutan dan Komunikasi tumbuh sebesar 11,68 persen atau naik sebesar 4,11 persen dibandingkan dengan tahun 2008

Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sektor jasa-jasa mengalami pertumbuhan yang paling lambat. Dimana pertumbuhan pada tahun 2008 mencapai 4,22 persen, sedangkan tahun 2009 hanya tumbuh sekitar 0,50 persen. Hal ini terjadi pada subsektor pemerintahan umum, dimana pertumbuhan yang terjadi pada tahun 2008 masing-masing hanya mencapai 0,25 persen saja dari tahun sebelumnya.

Tabel 2

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mamasa Periode 2006-2009 (%) dan Sumber Pertumbuhan tahun 2009 (%).

Lapangan Usaha	2006	2007	2008	2009	Sumber Pertumbuhan 2009
Pertanian	3.6	4.9	6.87	3.62	2.57
Pertambangan Dan Penggalian	9.04	11.4	42.51	13.8	0.02
Industri Pengolahan	3.97	5.07	15.62	8.7	0.16
Listrik, Gas dan Air Bersih	24.78	28.58	29.62	14.33	0.01
Bangunan	12.62	12.81	42.12	13.21	0.21
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	4.02	6.72	1.57	3.52	0.46
Angkutan dan Komunikasi	8.78	10.86	7.57	11.68	0.08
Keuangan persewaan dan jasa Perusahaan	9.01	6.62	17.53	13.3	0.19
Jasa-Jasa	12.19	12.15	4.22	0.5	0.64
PDRB	5.45	6.67	7.87	4.33	4.34

Sumber: BPS Kab. Mamasa

Meskipun demikian, laju pertumbuhan sektor pertanian relatif sangat kecil, namun sumber pertumbuhan ekonomi terbesar di Kabupaten Mamasa pada tahun 2009 menempati urutan pertama, yakni sebesar 2,57 persen. Hal ini disebabkan karena sumbangan Sektor Pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Mamasa adalah lebih dari separuhnya yaitu sebesar 53,35 persen. Sumber pertumbuhan

terendah berasal dari Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih, yang memberikan andil hanya sekitar 0,01 persen, walaupun Sektor Jasa-Jasa pada tahun 2009 tumbuh 14,33 persen.

C. PDRB Perkapita

Salah satu ukuran yang bisa digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah /

wilayah adalah PDRB perkapita atau biasa disebut pendapatan perkapita. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamasa pertahun mampu meningkatkan PDRB perkapita penduduk Kabupaten Mamasa menjadi sebesar 7.146.439 rupiah pada

tahun 2009, sedangkan PDRB Perkapita Kabupaten Mamasa pada tahun sebelumnya hanya mencapai 6.510.247 rupiah. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut ini

Tabel 3
PDRB Perkapita Penduduk Kabupaten Mamasa periode 2005-2009

Tahun	PDRB Perkapita	Pertumbuhan
2005	4,358,281.00	
2006	4,806,245.00	10%
2007	5,478,311.00	14%
2008	6,510,247.00	19%
2009	7,146,438.00	10%
Rata-Rata	5,659,904.40	13%

Sumber: BPS KabMamasa

Pada table 4.10 dapat dilihat bahwa PDRB perkapita penduduk Kabupaten Mamasa dari tahun 2005 hingga tahun 2009 berubah sangat cepat. Pada tahun 2005 PDRB perkapita penduduk Kabupaten Mamasa baru mencapai 4.358.281,00 rupiah dan pada tahun 2009 telah mencapai 7.146.438,00 rupiah. Atau dengan kata lain selama lima tahun terakhir PDRB perkapita penduduk

Kabupaten Mamasa meningkat rata-rata 13%.

Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

Adapun realisasi Pendapatan Asli Daerah menurut komposisi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamasa periode 2005-2009 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4
Komposisi Tiap Jenis Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mamasa Periode 2005-2009

Sumber PAD	2005	2006	2007	2008	2009
Pajak Daerah	823,400,386	1,033,232,181	1,161,233,283	1,223,179,000	1,433,670,331
Retribusi Daerah	3,632,240,013	4,460,000,093	5,041,671,661	5,865,258,098	6,863,826,299
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	228,381,776	521,160,789	556,225,615	761,620,721	900,421,630
Lain - Lain Pendapatan Daerah yang sah	1,164,130,640	1,970,640,176	2,140,192,033	2,458,701,670	4,167,230,021
PAD	5,848,152,815	7,985,033,239	8,899,322,592	10,308,759,489	13,365,148,281

Sumber: Dispenda Kab. Mamasa

Pada tabel diatas menunjukkan hasil Pendapatran Asli Daerah Kabupaten Mamasa selau meningkat. Selama kurun waktu lima tahun tesebut, retribusi memberikan kontribusi terbesar bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamasa, yaitu sebesar Rp 3,632,240,013 pada tahun 2005, dan sampai pada tahun 2009 Rp 6,863,826,299, sehingga retribusi daerah di Kabupaten Mamasa merupakan sala satu sumber pendapatan yang diandalkan.

Kemudian kontribusi terbesar setelah retribusi daerah adalah Lain-Lain pendapatan yang sah. Masing- masing dari 2005-2009 adalah Rp 1,164,130,640 ;Rp 1,970,640,176 ; Rp 2,140,192,033 ; Rp 2,458,701,670 ; Rp 4,167,230,021.

Berikutnya diikuti besarnya pajak daerah yang tiap tahunnya meningkat dari tahun 2005-2009 yaitu dari jumlah Rp 823,400,386 pada tahun 2005, dan sampai tahun 2009 menjadi Rp 1,433,670,331. Sedangkan jumlah kontribusi terkecil diperoleh dari Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu tahun 2005 hanya sebesar Rp 228,381,776 dan trus meningkat sampai menjadi Rp 900,421,630 pada tahun 2009.

Selanjutnya dapat dilihat peningkatan jumlah PAD dan persentasenya di Kabupaten Mamasa, seperti pada tabel berikut:

Tabel 5
PAD dan Pertumbuhannya di Kabupaten Mamasa Periode 2005-2009

Tahun	PAD	Perentase Pertumbuhan PAD
2005	5,848,152,815	-
2006	7,976,033,239	36%
2007	8,899,322,592	12%
2008	10,308,759,439	16%
2009	13,365,148,281	30%
Rata-Rata	9,279,483,273	23%

Dispenda Kab. Mamasa

Rata-rata peningkatan PAD tiap tahunnya adalah 23%. Dan dengan melihat angka-angka yang terdapat pada tabel 5.18, dapat diuraikan bahwa pada tahun 2005 PAD Kabupaten Mamasa sebesar Rp.5.848.152.815, kemudian menyusul tahun 2006 yaitu meningkat sebesar 7.976.033.239 atau meningkat sebesar 36%. Selanjutnya untuk tahun 2007 Pendapatan Asli Daerah meningkat 12% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.8.899.322.592. Dari tahun 2006-2007

kenaikan persentase PAD Kabupaten Mamasa menurun yaitu pertumbuhannya hanya 12%, tapi pada tahun 2008 mengalami pertumbuhan 14% dari tahun 2007. Dan seperti terlihat pada tabel kenaikan PAD tertinggi terjadi pada tahun 2009, yaitu 13.365.148.281 atau meningkat sebesar 30%.

D. Dampak Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tabel 6
Hubungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan Pendapatan Asli Daerah

Tahun	(PDRB) (x)	Pendapatan Asli Daerah(y)	Xy	x ²	y ²
2005	525.16	5,848.15	3,071,214.45	275,793.03	34,200,891.35
2006	585.35	7,976.03	4,668,769.16	342,634.62	63,617,106.23
2007	675.87	8,899.32	6,014,783.41	456,800.26	79,197,942.60
2008	816.79	10,308.76	8,420,092.08	667,145.90	106,270,521.17
2009	901.41	13,365.15	12,047,479.86	812,539.99	178,627,188.57
Total	3504.58	46,397.42	34,222,338.96	2,554,913.80	461,913,649.92

Koefisien Determinasi

$$r^2 = \frac{[n \sum xy - (\sum x)(\sum y)]^2}{(n \sum x^2 - (\sum x)^2)(n \sum y^2 - (\sum y)^2)}$$

$$r^2 = \frac{[5 \times 34.222.338,96 - (46.397,42)(3.504,58)]^2}{[5 \times 461.913.649,92 - (46.397,42)^2][5 \times 2.554.913,80 - (3.504,58)^2]}$$

$$r^2 = \frac{72.390.482.887.816}{77.245.872.021.536,60}$$

$$r^2 = 0,94$$

Selanjutnya berapa besar pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat dari koefisien determinasi (r^2) yaitu sebesar 0,94. Ini berarti bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 93,71%. Sedangkan sisa sebesar 6,29% dipengaruhi oleh variabel - variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian

Koefisien Korelasi

$$r = \sqrt{r^2}$$

$$r = \sqrt{0,94}$$

$$r = 0,97$$

Dan koefisien korelasi (r) 0,97 menunjukkan bahwa hubungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah, sangat kuat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sangat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Besarnya pengaruh PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 93,71%.
3. Perhitungan PDRB yang digunakan di Kabupaten Mamasa yaitu PDRB atas harga berlaku.

B. Saran

Sehubungan dengan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah Kabupaten Mamasa dalam:

1. Mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamasa dengan cara mengoptimalkan sumber pendapatan yang ada.
2. Mengoptimalkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mamasa melalui upaya peningkatan pengembangan sektor yang mempunyai potensi besar dalam meningkatkan perekonomian

masyarakat, seperti sektor pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

Adiatmojo, Gatot Dwi., 2003, *Pembangunan Berkelanjutan Dengan Optimasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk Membangun Perekonomian dengan Basis Pertanian*,(online), (<http://buletinlitbang.go.id/index.asp?v nomor =9&mnorutisi=5>)

Kuncoro, Mudrajad, 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Erlangga: Jakarta

Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi:, Yogyakarta.

..... 2007. *Pedoman Nasional Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*,Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Perimbangan,

Nawawi, Ismail, 2009. *Pembangunan dan Problema Masyarakat Kajian konsep, Model, Teori dari Aspek Ekonomi dan Sosiologi*, Putra Media Nusantara: Surabaya.

Prasetia, Gede Edy, 2005. *Analisis Keuangan Daerah*, Andi: Yogyakarta

Susanti , Hera, 2007. *Indikator – Indikator Makroekonomi*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: Jakarta

Undang-Undang , 2002, *Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003*. (online),(<http://www.cimbuak.com/articles>).

....., 2004, *Undang – Undang Republik Inonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Cv Eko Jaya.

....., 2004, *Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Cv Eko Jaya.

*) Penulis adalah Dosen Tetap Yayasan STIE YPUP Makassar